

ABSTRAK

DAMPAK OVER KAPASITAS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK NARAPIDANA

(Studi Pada Lapas Kelas IIB Gunung Sugih)

Oleh:

DHEA RIZQIE AULIA

Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas adalah bagian dari sistem peradilan pidana yang berfungsi untuk melaksanakan hukuman penjara dan sebagai tempat pembinaan narapidana. Tujuan pembinaan narapidana di Lembaga pemasyarakatan seringkali menghadapi banyak hambatan sehingga mengakibatkan fungsi lembaga pemasyarakatan sebagai lembaga pembinaan menjadi kurang optimal dan bahkan berpotensi mengalami kegagalan. Permasalahan mendasar yang terlihat nyata adalah kelebihan hunian atau *over* kapasitas narapidana pada lapas-lapas di hampir seluruh wilayah Indonesia. Situasi serupa terjadi di Lapas Kelas IIB Gunung Sugih, yang menjadi lokasi penelitian ini. Berdasarkan data tahun 2024, kapasitas resmi lapas ini hanya untuk 350 orang, namun dihuni oleh 717 narapidana hal ini dengan jelas menunjukkan bahwa lapas kelas IIB Gunung Sugih mengalami *over* kapasitas yang tentunya akan berdampak terhadap pemenuhan hak-hak narapidana. Rumusan masalah yang diambil dari penelitian ini adalah bagaimanakah dampak *over* kapasitas di Lembaga pemasyarakatan kelas IIB Gunung Sugih terhadap pemenuhan hak-hak narapidana serta bagaimanakah kebijakan pemasyarakatan yang ada saat ini dalam mengatasi masalah *over* kapasitas di Lembaga pemasyarakatan.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dan yuridis empiris dengan cara meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung. Sumber dan jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder. Pihak yang menjadi narasumber yaitu Kepala Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan, Narapidana Lapas kelas IIB Gunung Sugih serta Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan pengolahan data melalui identifikasi, klasifikasi dan sistematisasi data. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Dhea Rizqie Aulia

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa dampak *over* kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunung Sugih telah memberikan dampak pada pemenuhan hak narapidana, di mana dari 12 hak yang seharusnya diterima, hanya 8 yang terpenuhi secara optimal. Terdapat 4 hak narapidana yang belum terpenuhi secara optimal akibat keterbatasan fasilitas dan sumber daya seperti hak atas pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, akses terhadap layanan informasi, penyampaian pengaduan atau keluhan, serta pelayanan sosial. *Over* kapasitas ini tidak hanya mempengaruhi kondisi fisik dan kesehatan narapidana, tetapi juga merusak tujuan pemidanaan, yakni pencegahan tindak pidana, pembinaan, dan reintegrasi sosial. Kebijakan pemasyarakatan untuk mengatasi *over* kapasitas mencakup berbagai upaya seperti remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, *restorative justice*, pemindahan narapidana antar-lapas, pembangunan fasilitas baru, reformasi kebijakan pemidanaan, dan amnesti.

Saran yang ditujukan dalam penelitian ini yaitu diharapkan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunung Sugih terus meningkatkan fasilitas sarana prasarana untuk mendukung pemenuhan semua hak-hak narapidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Solusi jangka panjang seperti penerapan *restorative justice* dan reformasi pemidanaan harus menjadi prioritas karena lebih berkelanjutan. Evaluasi berkala terhadap kebijakan yang telah diimplementasikan diperlukan untuk menyesuaikan langkah-langkah dengan kebutuhan lapas dan narapidana, sehingga tercipta sistem pemasyarakatan yang lebih manusiawi, efektif, dan berorientasi pada rehabilitasi serta reintegrasi sosial narapidana

Kata Kunci: *Over* kapasitas, Lembaga Pemasyarakatan, Hak-Hak Narapidana

ABSTRACT

THE IMPACT OF OVERCAPACITY IN CORRECTIONAL INSTITUTIONS ON THE FULFILLMENT OF PRISONERS' RIGHTS

(Study at Class IIB Gunung Sugih Correctional Facility)

By:

DHEA RIZQIE AULIA

Correctional Institution or Lapas is part of the criminal justice system that functions to carry out prison sentences and as a place for inmate development. The purpose of fostering inmates in correctional institutions often faces many obstacles, resulting in the function of correctional institutions as coaching institutions to be less than optimal and even potentially fail. The fundamental problem that is apparent is the overcrowding or overcapacity of prisoners in prisons in almost all regions of Indonesia. A similar situation occurs in Class IIB Gunung Sugih Correctional Facility, which is the location of this research. Based on 2024 data, the official capacity of this prison is only for 350 people, but is occupied by 717 prisoners. This clearly shows that the class IIB Gunung Sugih prison is experiencing overcapacity which will certainly have an impact on the fulfillment of prisoners' rights. The formulation of the problem taken from this research is how is the impact of overcapacity in the Gunung Sugih class IIB penitentiary on the fulfillment of prisoners' rights and how is the current correctional policy in overcoming the problem of overcapacity in the penitentiary.

This research method uses normative juridical and empirical juridical types of legal research by examining and collecting primary data obtained directly. Sources and types of data consist of primary data and secondary data. The source parties are the Head of the Registration and Community Guidance Sub-Section, Prisoners of class IIB Gunung Sugih Correctional Facility and Lecturers of the Criminal Law Section of the Faculty of Law, University of Lampung. Data

collection methods through literature studies and field studies with data processing through identification, classification and systematization of data. Data analysis used is qualitative analysis.

The results of the research and discussion show that the impact of overcapacity in the Gunung Sugih Class IIB Penitentiary has an impact on the fulfillment of prisoners' rights, where of the 12 rights that should be received, only 8 are optimally fulfilled. There are 4 rights of prisoners that have not been fulfilled optimally due to limited facilities and resources such as the right to health services and proper food, access to information services, submission of complaints or grievances, and social services. This overcapacity not only affects the physical condition and health of prisoners, but also undermines the objectives of punishment, namely crime prevention, guidance, and social reintegration. Correctional policies to address overcapacity include various efforts such as remission, assimilation, parole, restorative justice, inter-prison transfer, construction of new facilities, reform of sentencing policies, and amnesty.

Suggestions addressed in this study are that it is hoped that the Gunung Sugih Class IIB Correctional Institution will continue to improve infrastructure facilities to support the fulfillment of all prisoners' rights based on the provisions of the Law. Long-term solutions such as the application of restorative justice and sentencing reform should be a priority because they are more sustainable. Periodic evaluation of policies that have been implemented is needed to adjust measures to the needs of prisons and prisoners, so as to create a correctional system that is more humane, effective, and oriented towards the rehabilitation and social reintegration of prisoners.

Keywords: Overcapacity, Correctional Institution, Prisoners' Rights